Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]
Vol 2 Nomor 5 Mei 2022, hal 98-105
ISSN: 2808-6686

Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Afni Mediarti

[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, [2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

afnimediarti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2, serta untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil periode 2014-2018. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi peneriman PBB-P2 tahun 2014-2018 masih tidak efektif. Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 tahun 2014-2018 hanya mencapai rentang 0-10%, secara keseluruhan masih sangat kurang berkontribusi. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil, diantaranya terbatasnya jumlah petugas pajak, kurangnya sosialisasi baik bagi pegawai maupun masyarakatnya, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

***Kata Kunci**: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah*

1. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah, sehingga yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara, namun dalam proses pemungutannya tidak jarang mengalami kendala dan masalah seperti, masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelola segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu mengelola segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan, pembinaan, serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah agar lebih ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan wilayah yang berada di sekitar daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Desentralisasi adalah delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah didalam suatu organisasi (Astuty, 2015, hal. 217)..

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Dimulai tahun 2010 merupakan masa transisi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 24 Januari 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Efektivitas yang dikatakan baik menurut Harahap (2001, hal. 223) “Dalam mekanisme penerapan anggaran maka salah satu teknis yang selalu diterapkan adalah analisis penyimpangan”. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasi. Bila anggaran dianggap sebagai standar yang sudah benar dan akurat, maka secara prinsip kita harus mengusahakan agar realisasi dan target harus sama dengan anggaran (target), artinya penyimpangan diusahakan nol atau sedikit.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) se-

bagai sumber pendapatan daerah, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target, terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	WP yang Terdaftar	WP yang Membayar	WP yang Tidak Membayar
1	2014	1.000.000.000	195.567.987	33.255	1.420	31.835
2	2015	1.000.000.000	214.601.698	33.334	1.171	32.163
3	2016	750.000.000	344.416.587	34.052	1.819	32.233
4	2017	750.000.000	261.639.581	34.598	1.968	32.680
5	2018	3.000.000.000	350.271.449	36.971	3.354	33.617

Dari data yang disajikan mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Singkil, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil selalu berfluktuasi selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan realisasi penerimaan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2017 realisasinya mengalami penurunan dan pada tahun 2018 realisasinya kembali meningkat. Dengan arti lain realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Secara keseluruhan dari data pajak daerah yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, Pajak Bumi dan Bangungan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang targetnya paling tinggi kedua diantara pajak daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 seharusnya memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan pajak untuk daerah tersebut. Namun nyatanya, pencapaian realisasinya sangat jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajaknya.

2. METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan.

Definisi Operasional Variabel

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan daerah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang beralamat di Jalan Singkil-Rimo No. 05 Telp. (0658)8001064 pada bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019.

Jenis Data

1. Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis (Juliandi, dkk, hal 65).
2. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokkan), yang sifatnya menunujukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu.

Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target dan realisasi penerimaan PBB-P2 serta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut tabel pertumbuhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:

Tabel 2. Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase(%)
1	2014	1.000.000.000	195.567.987	19,56%
2	2015	1.000.000.000	214.601.698	21,46%
3	2016	750.000.000	344.416.587	45,92%
4	2017	750.000.000	261.639.581	34,89%
5	2018	3.000.000.000	350.271.449	11,68%

Berikut tabel nilai persentase kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:

Tabel 3. Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Persentase (%)
1	2014	3.778.859.419	195.567.987	5,18%
2	2015	4.253.695.051	214.601.698	5,05%
3	2016	4.738.355.197	344.416.587	7,27%
4	2017	6.919.310.656	261.639.581	3,78%
5	2018	4.464.669.923	350.271.449	7,85%

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target, terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

Tabel 4. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	WP yang terdaftar	WP yang membayar	WP yang tidak membayar
1	2014	1.000.000.000	195.567.987	33.255	1.420	31.835
2	2015	1.000.000.000	214.601.698	33.334	1.171	32.163
3	2016	750.000.000	344.416.587	34.052	1.819	32.233
4	2017	750.000.000	261.639.581	34.598	1.968	32.680
5	2018	3.000.000.000	350.271.449	36.971	3.354	33.617

Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil

Dari tabel perhitungan efektivitas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 804.432.013 dengan persentase efektivitas penerimaan sebesar 19,56%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 978.398.302 dengan persentase efektivitas penerimaan naik menjadi sebesar 21,46%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 405.583.413 dengan persentase efektivitas penerimaan naik menjadi sebesar 45,92%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 488.360.419 dengan persentase efektivitas penerimaan turun menjadi sebesar 34,89%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 2.649.728.551 dengan persentase efektivitas penerimaan turun menjadi sebesar 11,68%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Secara keseluruhan dari perhitungan efektivitas penerimaan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih tidak efektif.

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil

Dari tabel perhitungan kontribusi terlihat bahwa pada tahun 2014 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 195.567.987 dengan persentase kontribusi sebesar 5,18%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2015 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 214.601.698 dengan persentase kontribusi turun menjadi sebesar 5,05%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2016 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 344.416.587 dengan persentase kontribusi naik menjadi sebesar 7,27%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2017 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 261.639.581 dengan persentase kontribusi turun menjadi sebesar 3,78%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2018 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 350.271.449 dengan persentase kontribusi naik menjadi sebesar 7,85%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya. Meskipun persentase tersebut fluktuatif, akan tetapi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 persentasenya hanya mencapai rentang 0-10%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

3. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil

a. Faktor Internal
1) Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan perpajakannya.
2) Sarana dan prasarana yang belum mendukung dalam pelaksanaan perpajakannya.
3) Karena PBB baru dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2014, sehingga masih dalam masa penyesuaian dan perlu adanya sosialisasi bagi para pegawai dalam proses pelaksanaan perpajakannya.

b. Faktor Eksternal
1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.
2) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi perpajakannya.
3) Sejak dilakukannya pengalihan PBB pada tahun 2014 banyak terdapat data wajib pajak yang belum sesuai, sehingga terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak diketahui wajib pajaknya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014-2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014-2018 kurang dari 60%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.
3. Persentase kontribusi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di

kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014-2018 masih dalam rentang 0-10%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

4. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil, diantaranya terbatasnya jumlah petugas pajak, kurangnya sosialisasi baik bagi pegawai maupun masyarakatnya, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

REFERENSI

Ardila, I., Febriaty, H., & Astuti, R. (2021, November). Factors that Influence the Financial Literacy on Micro Small and Medium Entreprise. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 4, No. 2, pp. 144-149).

Astuty, W. (2015). Akuntansi Manajemen. Medan: Perdana Publishing.

Damaiyanti, N. P. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2009-2013. E-Jurnal Akuntansi, 9(1).

Halim, A. (2001). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Handoko, T. H. (2012). Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.

Hanum, Z., Rukmini, & Wibowo, M. R. (2018). Pengantar Perpajakan. Medan: Perdana Publishing.

Harahap, S. S. (2001). Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hutagaol, J. (2007). Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu.

Irfan, I. (2021, November). ANALISIS UPAH PEKERJA DENGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).

Irsan, M., & Lufriansyah, L. (2020). Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, *4*(1), 73-83.

Irsan, M., & Lufriansyah, L. (2020). Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, *4*(1), 73-83.

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Medan: UMSU Press.

Jumirin, J., & Lubis, Y. (2018). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *18*(2), 162-177.

Lubis, A. W., & Abdullah, I. (2021). Pengaruh Tingkat Solvabilitas Dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *4*(1).

Lubis, H. Z., & Pratiwi, D. (2021, March). PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 235-248).

Lubis, H. Z., Effendi, S., & Fatmawarni, F. (2021, November). Online Accounting Learning Problems Analysis During the Covid-19 Pandemic. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 4, No. 2, pp. 447-454).

Lubis, P. K. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia (JAKPI), 6(1).

Mardiasmo. (2009). Perpajakan (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.

Nasution, M. I., & Hadi, M. F. (2021, July). Peran Efikasi Diri dan Kepemimpinan dalam Menigkatkan Kinerja Karyawan. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 1046-1054).

Nasution, S., Alpi, M. F., & Nasution, M. T. (2021). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Amal Usaha Pemuda Muhammadiyah (Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Serdang Bedagai). *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, *2*(2), 236-245.

Pulungan, K. A. (2021). Determinan Faktor Likuiditas pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *4*(2), 271-282.

Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rakhmadi, A. J., Raisal, A. Y., Hidayat, M., Putraga, H., & Hayati, I. (2021, February). The Falak Science Observatory Of University Of Muhammadiyah North Sumatra (Oif Umsu) And The Contribution In Fajr Time Research. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 851-858).

Resmi, S. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Saragih, F., & Siregar, I. A. (2021, February). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 43-53).

Sihotang, I. M., & Husna, F. (2020, October). PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN PADAMASA COVID-19. In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis, 15(1).

Tarigan, K. W. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA), 1(3).

Tupti, Z., Arif, M., & Rambe, I. (2021). ANALYSIS OF FOOD PURCHASE DECISION MODELS USING MEDIA APPLICATIONS IN PRIVATE UNIVERSITIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, *1*(1), 93-104.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Utiarahman, N. R. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmu Efesiensi, 16(2).

Wahyudi, H., Anugerah, M. F., & Arif, M. (2021). Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, *4*(2), 44-61.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wardani, R. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2(3).

Yunandar, R. T., & Fahmi, M. (2022). IMPLEMENTASI METODE UNIFIED APPROACH PADA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ARUS KAS KLINIK CITAMA. *Jurnal Akrab Juara*, *7*(1), 53-64.